

STRATEGI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG KEMBALI WISATAWAN DI KOTA CIREBON

Oleh: Iwan Setiawan¹, Ria Adriani², Bella Saridrupadi³

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi pelestarian cagar budaya terhadap keputusan berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon. Pelestarian dilakukan agar masyarakat ikut serta dalam menjaga kelestarian cagar budaya yang ada. Strategi pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau, namun pelestarian terhadap keputusan berkunjung harus dilakukan dengan visi yang berwawasan dan diperuntukkan bagi kepentingan ke masa kini dan masa depan. Adapun hasil dari strategi pelestarian dan perlindungan ini agar dapat berguna bagi masyarakat harus dengan memperhatikan dan menjaga unsur-unsur penting, yaitu : integritas, keaslian, dan kemanfaatan baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jati diri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pelestarian cagar budaya yang keuntungannya dapat dirasakan oleh generasi saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Strategi Pelestarian Cagar Budaya sebagai Variabel (X) berada pada katagori Baik dan Keputusan Berkunjung kembali wisatawan sebagai Variabel (Y) berada pada katagori Baik. Hal ini dinyatakan bahwa Strategi Pelestarian Cagar Budaya berpengaruh terhadap Keputusan Berkunjung kembali wisatawan karena kedua Variabel tersebut dinyatakan Baik. Maka hipotesis yang penulis ajukan dapat teruji kebenarannya bahwa pelestarian cagar budaya didasarkan dimensi strategi dari Keban maka keputusan berkunjung kembali wisatawan aan meningkat. Kesimpulannya ada hubungan antara Strategi Pelestarian dengan Keputusan Berkunjung kembali para wisatawan ke cagar budaya di Kota Cirebon.

Kata Kunci : Strategi Pelestarian, Keputusan Berkunjung.

¹ Dosen Tetap Administasi Publik UNTAG Cirebon, e-mail: iwans7082@gmail.com

² Dosen Tetap Administasi Publik UNTAG Cirebon, e-mail: ria.adriyani@gmail.com

³ Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Cirebon, e-mail :bellasaridrupadi99@gmail.com

THE STRATEGY OF PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE ON THE DECISION TO RETURN TOURISTS IN CIREBON CITY

By: Iwan Setiawan⁴ , Ria Adriani⁵ , Bella Saridrupadi⁶

ABSTRACT

Preservation is a dynamic effort to preserve the existence of cultural heritage and its value by protecting, developing and utilizing it. Therefore, it is important to preserve the cultural reserve so that it can be forwarded to the next generation in good condition and not reduced in value, even need to be improved to shape it as an inheritance in the future. The strategy of preservation of cultural heritage to the tourist decision back is done so that people participate in preserving the conservation of existing cultural heritage. Preservation strategies are not only past-oriented, but preservation of visiting decisions must be made with a vision that is insightful and devoted to the present and future importance. The result of this conservation and protection strategy in order to be useful for the community must by observing and maintaining important elements, namely: integrity, authenticity, and benefits for science, history, religion, identity, culture, and economics through the preservation of cultural heritage that the benefits can be perceived by the current generation.

The results showed that the cultural reserve strategy as a variable (X) was in the category of good and the decision to revisit tourists as variable (Y) was in the category of good. It is stated that the cultural heritage preservation Strategy has an effect on the tourist's return decision as both variables are expressed. Thus the hypothesis that the authors can ask is the truth that the preservation of cultural heritage based on the dimension of Keban strategy then the decision to revisit tourists will increase. In conclusion there is a relationship between preservation strategy with the decision to revisit the tourists to the cultural reserve in Cirebon City.

Keywords: *Preservation Strategies, Visiting Decisions.*

⁴ Dosen Tetap Administasi Publik UNTAG Cirebon, e-mail: iwans7082@gmail.com

⁵ Dosen Tetap Administasi Publik UNTAG Cirebon, e-mail: ria.adriyani@gmail.com

⁶ Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Cirebon, e-mail :bellasaridrupadi99@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kota Cirebon merupakan kota dengan jumlah keraton terbanyak di Indonesia yang masih bertahan saat ini yaitu, Keraton Kesepuhan, Kanoman, Keprabonan dan Kacirebonan. Kota Cirebon juga memiliki pesona yang berbeda karena wilayahnya yang berada dekat dengan laut dan memiliki banyak peninggalan sejarah. Kebanyakan bangunan tersebut merupakan peninggalan jaman kolonial pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah:

“Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan / atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa – sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.”

Memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 undang-undang tersebut, semestinya mendiami bangunan dan memiliki benda Cagar Budaya menjadi kebanggaan. Kekayaan nilai sejarah tidak hanya dimiliki oleh pemilik bangunan, tetapi juga dapat dibagikan pada para pengunjung atau wisatawan. Lain halnya yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Mendiami bangunan bersejarah identik dengan berbagai tuntutan yang memberatkan. Biaya perawatan dan pajak yang terus menanjak tidak diimbangi dengan kepedulian pemerintah terhadap para penanggung jawab keraton dan situs sejarah lainnya.

Dalam mengelola Cagar Budaya dibutuhkan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah Kota Cirebon. Strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Kridalaksana, 1996). Strategi pelestarian Cagar Budaya perlu disusun dan diimplementasikan di setiap daerah yang memiliki kekayaan Cagar Budaya. Pelestarian adalah upaya terpadu untuk mengelolakan, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui strategi pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pelestarian suatu objek wisata Cagar Budaya memerlukan penanganan, tidak saja oleh para arkeolog tetapi oleh semua pemangku kepentingan. Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya adalah milik publik. Cagar Budaya memerlukan sebuah sistem legislasi dan administrasi yang khas sesuai dengan publiknya. Permasalahan dalam pelestarian selama ini sebagian besar terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang konsep dasar pelestarian khususnya dalam pengelolaannya.

Menurut Keputusan Gubernur Nomor. 156 Tahun 2018 tentang “Penetapan kawasan Keraton Kesepuhan kota Cirebon, kawasan Keraton Kanoman kota Cirebon, kawasan Keraton Kacirebonan kota Cirebon, Gedung merdeka kota Bandung, Observatorium Bossca kabupaten Bandung barat serta kawasan kota lama Cianjur sebagai kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat.”

Beberapa upaya strategi pelestarian nilai tradisional (baca pembangunan kebudayaan) Pemerintah Kota Cirebon adalah : (1) menerbitkan Surat Keputusan Walikota Cirebon No.19 Tahun 2001 tentang perlindungan kawasan dan bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon. Kawasan dan bangunan yang ditetapkan sebagai benda pelestarian Cagar Budaya berjumlah 31. Dalam Surat Keputusan ini dinyatakan, bahwa upaya perlindungan dan pelestarian kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan eksisting bangunan, pengendalian dan melalui perizinan (Ijin Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, dan Ijin Lainnya). Sementara upaya perlindungan bangunan Cagar Budaya (benda cagar budaya tidak bergerak) dilakukan melalui preservasi, upaya pelestarian bangunan seperti keadaan aslinya tanpa melakukan perubahan, rehabilitasi, pemulihan kondisi bangunan agar tetap dapat berfungsi. (2) dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan Keraton dan Taman Sari Goa Sunyaragi ditetapkan sebagai zona yang dilindungi, (3) menginventari dan mendokumentasi karya budaya benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*), seperti Cagar Budaya, upacara-upacara siklus hidup, kesenian tradisional, makanan khas, cerita rakyat dan sastra klasik Cirebon dan (4) memelihara dan menata situs dan Cagar Budaya serta memanfaatkannya sebagai objek wisata.

Namun demikian, dukungan pemerintah yang belum optimal dan pelestarian Cagar Budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kemajuan teknologi komunikasi dan industri hiburan telah menyebabkan perubahan– perubahan gaya hidup. Upaya pelestarian bangunan bersejarah ini masih menemui kendala dalam pelaksanaannya. Masih banyak masyarakat, khususnya pengusaha yang tidak paham atau tidak mau paham dengan keberadaan bangunan Cagar Budaya ini. Demi kepentingan bisnis, mereka mengubah bahkan memusnahkan bangunan saksi sejarah tersebut. Adapun permasalahan lainya yaitu Mahalnya pajak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cirebon kepada pemilik bangunan Cagar Budaya. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai ketentuan dalam Perda pengelolaan kawasan dan bangunan Cagar Budaya adalah salah satu indikasi terhadap kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara bangunan Cagar Budaya.

Permasalahan yang berkaitan dengan Cagar Budaya yaitu komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat pada dasarnya masih kurang, terbukti dengan kurangnya sosialisasi yang didapat oleh masyarakat, baik sosialisasi yang berasal dari pemerintah Kota Cirebon pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari pemerintah daerah. Beberapa bangunan cagar budaya kondisinya tidak terawat dan memprihatinkan. Sumber daya yang meliputi kemampuan pemerintah dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang menimpa serta kelengkapan sarana dan prasarana, kurang terpeliharanya benda Cagar Budaya di Kota Cirebon yang merupakan warisan budaya masyarakat, maka nilai – nilai kearifan lokal masyarakat yang ada juga harus mampu untuk terpelihara dengan baik.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Cirebon dalam pengelolaan bangunan cagar budaya, maka Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada bidang kebudayaan yang bertanggung jawab dalam

pelestarian cagar budaya terhadap berkunjung kembali wisatawan, maka dibuat rumusan masalah bagaimanakah strategi pelestarian cagar budaya terhadap keputusan berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi.

“Strategi menurut Glueck dan Jauch dalam (Sedarmayanti, 2014, p. 2) Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.”

Menurut Hax dan Majluf dalam (Salusu, 2015, p. 71) mengatakan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

- 1) Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
- 2) Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
- 3) Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
- 4) Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respons yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan
- 5) Melibatkan semua tingkat hierarki dan organisasi.

Dengan definisi ini dapat disimpulkan bahwa strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Dimensi Strategi Administrasi Publik

Dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literatur maka administrasi publik dari enam dimensi strategis yaitu : (Keban, 2019, pp. 12-13)

1) Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistim kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

2) Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target termasuk wewenang dan tanggung

jawabnya. **Proses** tersebut dapat diumpamakan dengan sistim organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri, dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.

3) **Dimensi Manajemen**

Dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Ini dapat dianalogikan dengan sistim jantung dan urat nadi yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh termasuk ke organ – organnya agar dapat bergerak dan berfungsi.

4) **Dimensi Etika**

Dimensi etika memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan apa yang buruk. Ini diibaratkan dengan sistim sensor pada tubuh manusia seperti perasaan intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia.

5) **Dimensi Lingkungan**

Dimensi lingkungan diibaratkan dengan suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada seperti dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral. Hal ini di ibaratkan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi dimana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Mana kala iklim atau suhu serta lokasi kurang cocok dengan tubuh manusia maka tubuh tersebut akan sakit atau terhambat untuk berkembang. Iklim ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mewarnai dinamika administrasi public suatu negara. Karena itu kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan menjadi sangat vital.

6) **Dimensi Kinerja**

Dimensi kinerja yaitu, suatu janji kepada publik yang harus dipenuhi atau ditepati, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai macam kegiatan pelayanan atau pemberian barang – barang publik. Dengan demikian dimensi terakhir dan paling menentukan dari dunia administrasi publik adalah Dimensi Akuntabilitas Kinerja. Dimensi ini memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil pemerintah yang menjalankan fungsi – fungsi administrasi publik didalam suatu negara.

Pengertian Pelestarian

Menurut Tim Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dalam buku Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan (Kebudayaan T. D., 2004, p. 5)

“Pelestarian adalah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non fisik (*intangible culture*) seperti nilai – nilai tradisi, istilah pelestarian ini dapat dimaksudkan sebagai upaya agar nilai – nilai luhur yang ada

dalam satu tradisi dapat tetap dipertahankan meskipun telah melalui proses transformasi budaya (perubahan bentuk), namun tidak menghilangkan nilai – nilai budaya yang terkandung didalamnya. Sedangkan pelestarian yang bersifat fisik (*tangible*) merupakan suatu upaya agar suatu benda tidak berubah, tetap sebagaimana keadaan semula, serta dipertahankan keberadaan dan keabadiannya seperti benda – benda purbakala.”

Berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010, pelestarian adalah “Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kebudayaan B. P., 2018, p. 979) berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama – lamanya tidak berubah.

Sedangkan pelestarian adalah proses, cara, pembuatan melestarikan; perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi. Nia kurmasih Potoh dalam (Nani, 2003, p. 36) mengemukakan bahwa konsep awal pelestarian adalah servasi, yaitu upaya elestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya.

Selanjutnya, ada Eko Budihardjo dalam (Nani, 2003, p. 35) menjelaskan pelestarian, yaitu :

“Upaya preservasi mengandung arti mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan tradisional/kuno persis seperti keadaan asli semula. Karena sifat preservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (*conservation areas*) dan bahkan kota bersejarah (*histories towns*). Dengan pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dilakukan, menilai dari inventarisasi bangunan bersejarah kolonial maupun tradisional, upaya pemugaran (*restorasi*), rehabilitasi, rekontruksi, sampai dengan revitalisasi yaitu pemberian nafas kehidupan baru.”

Maka pelestarian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

Pengertian Cagar Budaya

Menurut pasal 1 UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan definisi cagar budaya adalah : Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pengertian ini diperjelas bahwa cagar budaya meliputi :

- 1) Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau buatan manusia, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian – bagiannya, atau sisa – sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

- 2) Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
- 3) Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 4) Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
- 5) Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Strategi dan Program Pelestarian

Strategi dan program pelaksanaan pelestarian yang diimplementasikan membutuhkan upaya pendekatan lintas sektoral dalam bentuk berikut ini; Hadiyanta, 2017, pp. 161-162) ;

- 1) Membuat Rencana Induk (*master plan*) dan mengimplementasikan upaya dan kepastian penentuan ruang untuk pelestarian serta pemanfaatan kawasan. Studi kelayakan dan studi teknis yang meliputi penentuan kelayakan bangunan, identifikasi, perencanaan penelitian, perencanaan teknis, perencanaan desain detail, dan mengimplementasikan arah kegiatan selanjutnya.
- 2) Pembuatan arahan *guideline* pelestarian kawasan, dapat menentukan skala prioritas rencana program pelestarian potensi sumber daya budaya dan kawasannya. Hal ini sesuai dengan kondisi realistis dan urgensinya. Preservasi bangunan dan kelompok bangunan, baik secara tradisional maupun kimiawi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ancaman dan menghambat proses kerapuhan serta kerusakan.
- 3) Pemugaran bangunan yang mengalami kerusakan dengan beberapa pendekatan antara lain : rekonstruksi, restorasi, rehabilitasi, konsolidasi, dan konservasi.
- 4) Penataan lingkungan dalam bentuk zonasi atau penentuan batas situs untuk pengamanan situs dengan langkah – langkah : penentuan zonasi atau pemintakan inti, penyangga, pengembangan di setiap sumber daya arkeologi. Hal ini untuk menjamin kepastian pemanfaatan tata ruang kawasan. Menghidupkan kembali tempat yang potensial untuk mewujudkan kembali vitalitas kawasan, baik dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, dukungan utilitas sehingga tercapai misi pelestarian.

Keputusan Berkunjung Wisatawan

Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah – langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen atau dalam kehidupan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi.

Menurut Inbar dalam (Salusu,2015, p.32), menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dipahami dalam dua pengertian, yaitu :

Pertama, penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita – cita, aspirasi. **Kedua**, pencapaian melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dari semua perintikan pada hubungan kemanusiaan.

Menurut Bridges dalam (Salusu, 2015, p. 31), dalam studi literturnya mengemukakan pengambilan keputusan, yaitu :

“Memutuskan” (*implisit*) dan “bertindak” (*eksplisit*) sebagai hal yang begitu penting bagi organisasi manapun. Dalam berbagai organisasi besar berabad – abad yang lampau kelihatannya para pengambil keputusan cenderung memberi tempat yang lebih menonjol pada unsur “bertindak” (*doing*).

Itulah salah satu sehingga konsep pengambilan keputusan tidak dapat berkembang dengan cepat. Tetapi, karena para pembuat keputusan dalam berbagai organisasi semakin hari semakin menghadapi kondisi – kondisi internal yang kian kompleks dan yang terus dihadapkan dengan lingkungan yang terus menerus berubah. Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi pengambilan keputusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek yang paling penting dari kegiatan manajemen.

Keputusan (*decision*) menurut Drucker dalam (Salusu, 2015, p. 34) keputusan berarti pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Namun, ia hampir tidak merupakan pilihan antara yang benar dan yang salah, tetapi justru sering terjadi ialah pilihan antara yang “hampir benar” yang “mungkin salah”.

Menurut Mc Grew dan Wilson dalam (Salusu, 2015, p. 35) mengungkapkan bahwa suatu keputusan ialah :

“Keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis, yang diberi label pengambilan keputusan. Ia dipandang sebagai proses karena terdiri atas satu seri aktivitas yang berkaitan dan tidak hanya dianggap sebagai tindakan bijaksana.” Selanjutnya, ada Morgan dan Cerullo dalam (Salusu, 2015, p. 35)

mendefinisikan bahwa keputusan adalah :

“Sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertimbangan ialah menganalisis beberapa kemungkinan atau alternatif, sesudah itu dipilih satu di antaranya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan adalah sebuah pilihan yang diambil dari berbagai macam pilihan untuk dilaksanakan. Keputusan merupakan hasil dari proses memilih pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang telah tersedia.

Karakteristik Keputusan Strategi

Menurut Schwenk dalam (Salusu, 2015, pp. 77-78) ada tujuh karakteristik keputusan strategi, yaitu :

- 1) Tidak terstruktur dan nonrutin, keputusan strategi tidak dapat dibuat hanya dengan menggunakan aturan pengambilan keputusan yang sederhana, bahkan juga tidak bisa dibuat dengan menggunakan formula.
- 2) Keputusan strategi memegang peranan sentral bagi organisasi karena menyangkut komitmen yang sangat luas tentang sumber daya, ditambah dengan kemungkinan risiko besar yang mungkin akan timbul, atau sebaliknya dapat membuahkan hasil yang memuaskan.
- 3) Keputusan stratejik umumnya sangat kompleks sehingga itu memiliki daya Tarik tersendiri untuk dipelajari.
- 4) Keputusan stratejik memiliki kelainan tersendiri.
- 5) Selain melibatkan sumber daya yang besar juga sangat kompleks. Salah satu kompleksitas dalam keputusan stratejik adalah “keterlibatan” dari sejumlah orang dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Memiliki konsekuensi yang besar, menyangkut kehidupan organisasi secara keseluruhan. Semakin serius konsekuensi itu, semakin besar kekhawatiran berbuat salah. Semakin meluas dan semakin tersebar konsekuensi itu, semakin tidak mudah menggambarkan implikasi dari keputusan itu.
- 7) Selalu mendahului, artinya ia menetapkan preseden. Ia menentukan keputusan apa yang harus diperbuat berikutnya. Keputusan berikutnya lebih mudah dibuat karena telah ada pedomannya.

Pengertian Wisatawan

Menurut Undang – undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dan 2 dirumuskan ; Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

Menurut UN. Convention Concerning Customs Facilites For Touring Wisatawan adalah setiap orang yang datang disebuah Negara karena alasan yang sah kecuali untuk berimigrasi dan yang tinggal setidaknya – tidaknya 24 Jam dan selamalamanya 6 Bulan dalam tahun yang sama.

Norval dalam (Suwena & Widyatama, 2017, p. 33) mengatakan bahwa wisatawan adalah :

“Every person who comes to a foreign country for a reason than to establish his permanent residence or such permanent work and who spends in the country of his temporary stay, the money he has earned else where”. Artinya setiap orang yang datang dari suatu Negara yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur, dan yang di Negara di mana ia tinggal untuk sementara itu membelanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat.

Dalam rumusan Komisi Statistik ini dicantumkan batas maksimal kunjungan selama 6 bulan, sedangkan batas minimum 24 jam dikesampingkan. Selanjutnya batasan yang semula berdasarkan kebangsaan (*nationality*) diganti dengan berdasarkan tempat tinggal sehari – hari wisatawan (*Country of Residence*). Menyadari ketidakseragaman pengertian tersebut, Internasional *Union of Official Travel Organization (IUOTO)* sebagai badan organisasi pariwisata internasional yang memiliki anggota kurang lebih 90 negara telah mengambil inisiatif dan memutuskan batasan yang sifatnya seragam melalui PBB pada tahun 1963 di Roma memberikan definisi sebagai berikut :

- 1) Pengunjung (*visitors*) adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara lain dimana ia mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya.
- 2) Wisatawan (*tourist*) adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalanannya dapat diklasifikasikan pada salah satu hal berikut ini; memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan olahraga, Bisnis atau mengunjungi kaum keluarga.
- 3) Darmawisata (*excursionist*) adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya, termasuk orang yang berkeliling dengan kapal pesiar, namun tidak termasuk para pesiar yang memasuki negara secara legal, contohnya orang yang hanya tinggal di ruang transit pelabuhan udara.

Smith dalam (Pitana & Gayatri, 2005) juga melakukan klasifikasi terhadap wisatawan dengan membedakan wisatawan atas tujuh kelompok, yaitu ;

- 1) *Explorer*, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal, dan bersedia menerima fasilitas seadanya, serta menghargai norma dan nilai – nilai lokal.
- 2) *Elite*, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan lebih dahulu, dan bepergian dalam jumlah kecil.
- 3) *Off-beat*, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat – tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas seadanya di tempat lokal.
- 4) *Unusual*, yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya sekali waktu juga mengambil aktifitas tambahan, untuk mengunjungi tempat – tempat yang

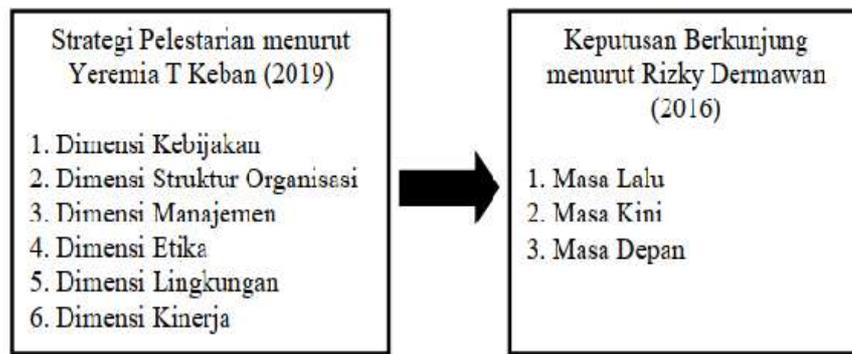
baru, atau melakukan aktivitas yang agak beresiko. Meskipun dalam aktivitas tambahannya bersedia menerima fasilitas apa adanya, tetapi program pokoknya tetap harus mendapatkan fasilitas yang standar.

- 5) *Incipient Mass*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual atau kelompok kecil, dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian (*authenticity*).
- 6) *Mass*, yaitu wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya.
- 7) *Charter*, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya, dan biasanya hanya untuk bersenang-senang/bersantai. Mereka bepergian dalam kelompok besar dan meminta fasilitas yang berstandar internasional.

Menurut Dermawan dalam menyebutkan bahwa pengambilan keputusan adalah ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi dan tindakan yang tersedia guna menyelesaikan masalah. Selain itu pengambilan keputusan juga berarti merupakan seseorang atau sekelompok yang berwenang untuk membuat pilihan akhir atau keputusan memilih satu diantara beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan. Adapun faktor – faktor penentu dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) **Masa Lalu**, terkait dengan pengalaman dan kejadian masa lalu, keinginan –keinginan masa lalu yang belum terwujud, masalah dan tantangan yang timbul pada masalah dan belum terselesaikan dan juga ketersediaan informasi mengenai masa lalu/sejarah.⁴⁵
- 2) **Masa Kini**, pada umumnya terkait dengan perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, sosial dan juga budaya. Adanya dorongan visi, misi, tujuan dan keinginan yang hendak diraih pun dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, adanya konsep mengenai kelangkaan dan keterbatasan dan juga mengenai tindakan atas dasar kesadaran untuk memilih salah satu alternatif solusi atas masalah yang dihadapi dan tantangan yang timbul.
- 3) **Masa Depan**, adanya visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai, perubahan factor lingkungan yang akan terjadi, ketidakpastian peluang tentang timbulnya resiko dan kelangkaan serta ketersediaan “*expected information*” yang diharapkan membantu proses pengambilan keputusan. (Dermawan, 2016, pp. 29-30).

Adapun Paradigma Pemikiran tentang Strategi Pelestarian Cagar Budaya terhadap Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon:



Gambar: Paradigma Pemikiran tentang Strategi Pelestarian Cagar Budaya terhadap Keputusan Berkunjung.

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Jika pelestarian cagar budaya didasarkan dimensi strategi dari Yeremia T Keban maka keputusan berkunjung kembali wisatawan akan meningkat”.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2013, p. 105). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif. Menurut Racmat Kriyantono (2008, p.25). Penelitian Kuantitatif adalah “Riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan”.

Data Primer diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan kuesioner, interview/wawancara. Data kuesioner diperoleh berdasarkan angket – angket yang berisi pertanyaan/pernyataan tertulis tentang strategi pelestarian cagar budaya terhadap keputusan berkunjung kembali wisatawan. Dalam penelitian ini, data primer yang diperlukan peneliti adalah jumlah pengunjung berwisata ke kota Cirebon. Sementara data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumbernya data yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen – dokumen yang berupa data yang diolah dari objek penelitian. Sumber data diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik berikut : studi literature, studi lapangan (*field research*) dengan teknik-teknik sebagai berikut: Pengamatan (*Observasi*), Wawancara (*Interview*) dan Kuesioner.

Populasi sasaran dalam penelitian ini ada 60 orang, terdiri dari pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon sebanyak 44 orang ditambah masyarakat/wisatawan sebanyak 16 orang yang dipilih secara acak. Dengan sampel berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya 60 orang responden terdiri dari 44 orang pegawai di Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dengan kuesioner secara tertulis/daring dan 16 orang mewakili

masyarakat/wisatawan yang berkunjung ke Cagar Budaya Kota Cirebon Dengan demikian jumlah sample yang dijadikan responden sejumlah 60 orang.

Untuk pengukuran variabel penelitian, maka kedua variable dioperasionalkan dalam indikator – indikator sebagai berikut:

Operasional Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y)

Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
Variabel Bebas (X) Strategi Pelestarian Menurut (Keban, 2019, p. 12)	Dimensi Kebijakan	1. Prinsip – prinsip tertentu. 2. Suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. 3. Alasan – alasan tertentu.	1. 2. 3.
	Dimensi Struktur Organisasi	1. Standard Kerja 2. Aturan/Prosedur 3. Tanggung Jawab	4. 5. 6.
	Dimensi Manajemen	1. Penganggaran 2. Perencanaan dan Kontrol 3. Produktivitas sumberdaya manusia	7. 8. 9.
	Dimensi Etika	1. Nilai – nilai moral. 2. Kode etik 3. Hak dan kewajiban moral	10. 11. 12.
	Dimensi Lingkungan	1. Kepercayaan masyarakat 2. Teknologi 3. Kompetensi	13. 14. 15.
	Dimensi Kinerja	1. Kualitas kerja 2. Kuantitas kerja 3. Kerja sama	16. 17. 18.
Variabel Terikat (Y) Keputusan Berkunjung Menurut (Dermawan, 2016, pp. 29-30)	Masa Lalu	1. Peninggalan dan peristiwa masa lalu 2. Keinginan masa lalu yang belum terwujud 3. Ketersediaan informasi masa lalu/sejarah	1. 2. 3.
	Masa Kini	1. Perubahan faktor lingkungan 2. Adanya konsep kelangkaan dan keterbatasan 3. Ketersediaan “ <i>real-time/ on time information</i> ”, informasi yang relevan dan berkualitas	4. 5. 6.
	Masa Depan	1. Visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai 2. Ketidakpastian, peluang timbulnya risiko dan kelangkaan 3. Ketersediaan “ <i>expected information</i> ” yang diharapkan membantu proses pengambilan keputusan	7. 8. 9.

Sumber : Data Kepustakaan penulis, 2020

Selanjutnya untuk keperluan menganalisis data variabel Strategi Pelestarian dan Keputusan Berkunjung dapat dilihat dari kecenderungan jawaban responden dengan menggunakan skala likert. Untuk keperluan kuantitatif dan juga memberikan nilai terhadap jawaban dalam kuesioner / angket dibagi dalam 5 (lima) tingkat alternatif jawaban yang disusun bertingkat dengan pemberian bobot nilai (skor) sebagai berikut:

Bobot Skor Jawaban

No.	Uraian	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

(Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, 2008, hal. 108).

Analisis data dengan menggunakan nilai jenjang sebagai berikut:

- a. Nilai presentase terkecil = $60 : 300 \times 100\% = 20\%$
- b. Nilai presentase terbesar = $300 : 300 \times 100\% = 100\%$
- c. Range/rentang = $80\% : 5 = 16\%$

Sehingga klasifikasi kriteria penilaian persentase adalah sebagai berikut :

Klasifikasi kriteria Penilaian Presentase

No	Interval Presentase	Kriteria
1	20-36	Sangat Tidak Baik
2	37-52	Tidak Baik
3	53-68	Kurang Baik
4	69-84	Baik
5	85-100	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggabungkan teknik sampel sensus kepada seluruh pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon dengan jumlah 44 orang dan teknik sampel random kepada masyarakat/wisatawan yang dilakukan secara acak dengan jumlah 16 orang. Dengan demikian jumlah sampel yang dijadikan responden sejumlah 60 orang.

Skor yang diperoleh pada variabel x strategi pelestarian berdasarkan **akumulasi jawaban responden** menunjukkan **hasil Baik**, yaitu dengan skor **4404 Presentase 82%**. Dari hasil interval dibawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah yang diperoleh dari semua skor tanggapan Strategi Pelestarian Cagar Budaya di Kota Cirebon berdasarkan Dimensi Strategi Pelestarian sudah terlaksana walaupun belum optimal dikarenakan ada beberapa indikator variabel Strategi Pelestarian yang masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden untuk Variabel Strategi Pelestarian (n = 60)

No. Pernyataan	Skor Jawaban					Jumlah
	5	4	3	2	1	
1.	105	88	51	0	0	244
2.	50	132	42	4	1	229
3.	145	92	24	0	0	261
4.	65	132	39	2	0	238
5.	80	136	27	2	0	245
6.	105	104	36	2	0	247
7.	45	124	57	2	0	228
8.	55	132	45	2	0	234
9.	45	120	60	2	0	227
10.	140	120	6	0	0	266
11.	90	136	21	2	0	249
12.	85	156	9	2	0	252
13.	65	156	24	0	0	245
14.	110	140	9	0	0	259
15.	25	120	60	8	1	214
16.	95	156	6	0	0	257
17.	85	132	30	0	0	247
18.	135	112	15	0	0	262
Total Skor						4404

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Skor penilaian dalam persentase = $\frac{4404}{5400} \times 100\% = 81,5\%$ dibulatkan 82%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jawaban skor yang diperoleh pada Variabel (X) Strategi Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan tabulasi skor tanggapan responden ialah 4404 dengan demikian Strategi Pelestarian Cagar Budaya di Kota Cirebon dinyatakan Baik.

Dari hasil semua jawaban berdasarkan responden tabulasi skor tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan intervalnya adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
1080	1944	2808	3672	4536
			4404	5400

Pelaksanaan strategi Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya melestarikan Cagar Budaya di Kota Cirebon dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dibeberapa strategi. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata harus dapat membenahi kekurangan-kekurangan pada Pelestarian Cagar Budaya di Kota Cirebon dari segala faktor yang ada. Dengan demikian Strategi harus terus berjalan dengan adanya perkembangan-perkembangan dan perubahan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Sementara uraian hasil jawaban responden Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon. Sebelumnya penulis akan menuliskan nilai terendah dan nilai tertinggi sebagai berikut :

Skor Jawaban Responden untuk Variabel Keputusan Berkunjung (n = 60)

No. Pernyataan	Skor Jawaban					Jumlah
	5	4	3	2	1	
1.	95	152	6	2	0	255
2.	90	144	15	2	0	251
3.	95	152	9	0	0	256
4.	105	136	15	0	0	256
5.	95	148	12	0	0	255
6.	75	160	15	0	0	250
7.	95	148	12	0	0	255
8.	45	124	48	6	1	224
9.	100	156	3	0	0	259
Total Skor						2261

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jawaban skor yang diperoleh pada Variabel (Y) Keputusan Berkunjung berdasarkan tabulasi skor tanggapan responden ialah 2261 dengan demikian Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon **dinyatakan Baik**.

Dari hasil semua jawaban berdasarkan responden tabulasi skor tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan intervalnya adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
540	972	1404	1836	2268
				2261
2700				

Skor yang diperoleh pada variabel Y Keputusan Berkunjung berdasarkan akumulasi jawaban responden menunjukkan hasil Baik, yaitu dengan skor 2261 Presentase 84%. Dari hasil interval diatas dapat dilihat bahwa jumlah yang diperoleh dari semua skor tanggapan Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon berdasarkan Dimensi Keputusan Berkunjung yang sudah terlaksana.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan pelaksanaan strategi pelestarian Cagar Budaya terhadap keputusan berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon antara lain :

- 1) Penetapan status situs Cagar Budaya yang belum jelas yaitu semakin seringnya muncul situasi ketika sejumlah situs Cagar Budaya terancam rusak atau hancur oleh tindakan manusia, namun sulit, dicegah karena situs tersebut belum ditetapkan sebagai cagar budaya.
- 2) Penetapan zonasi yang kurang melindungi keseluruhan aset Cagar Budaya. Zonasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka perlindungan Cagar

Budaya, namun dalam praktek tidak jarang menghadapi banyak kendala, bahkan sering masalah dibiarkan tidak dituntaskan.

- 3) Konflik Pemanfaatan dan Pengelolaan.
- 4) Sarana dan Prasarana yang belum memadai misalnya kurangnya dana yang ada di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sehingga program-program yang telah direncanakan sebelumnya tidak bisa berjalan dengan maksimal,
- 5) Fasilitas yang belum memadai seperti tempat makan dan minum bagi wisatawan, kondisi akses yang masih kurang baik, belum tersedia pemandu wisata pada situs Cagar Budaya, ada beberapa fasilitas yang belum berfungsi dengan maksimal, ada beberapa keran air yang tidak berfungsi dengan baik, serta kebersihan yang ada pada fasilitas-fasilitas ini juga harus tetap dijaga, ada beberapa pengunjung yang mengatakan bahwa kebersihan dan toiletnya kurang terjaga.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya yang dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk mengatasi strategi pelestarian cagar budaya terhadap keputusan berkunjung kembali wisatawan:

- 1) Penetapan situs Cagar Budaya secara efektif dan efisien seperti ;penerbitan surat keputusan baru yang menggantikan surat keputusan sebelumnya. Argumen penetapannya adalah bahwa pengertian "situs" yang ditetapkan dalam SK yang lama memiliki pengertian baru sesuai ketentuan.
- 2) Penetapan sistem zonasi yang melindungi semua komponen Cagar Budaya.
- 3) Perencanaan pelestarian secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pelestarian Cagar Budaya pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Cirebon yang selanjutnya bernaung dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana;Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon perlu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan memasukkan anggaran dalam RAPBD setiap tahunnya, perlu memfokuskan penyediaan sarana dan parasa secara satu-persatu mengingat banyaknya situs Cagar Budaya yang ada, dan membangun kepedulian masyarakat akan pelestarian Cagar Budaya di Kota Cirebon.
- 5) Fasilitas yang terjamin;Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon mencoba menerapkan aturan, menata situs Cagar Budaya, kenyamanan dan keselamatan artinya situs Cagar Budaya layak dikunjungi kembali. Kenyamanan dan kebersihannya memenuhi kriteria dan pengunjung merasa nyaman dan melakukan kunjungan kembali.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pelestarian Cagar Budaya terhadap Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Strategi Pelestarian Cagar Budaya terhadap Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon sudah terwujud dengan baik, terlihat dengan adanya hasil frekuensi kumulatif tanggapan responden menyatakan setuju untuk Strategi Pelestarian Cagar Budaya yang didasarkan pada Indikator Strategi Pelestarian dinyatakan dengan skor 4404 (82%) karena berada pada nilai rentang 3672 sampai dengan 4536 yang berarti berada pada kriteria Baik. Dari analisis data Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon telah dilaksanakan dengan Baik. Rata-rata jawaban responden bernilai Baik, ini dibuktikan dari analisis data penilaian yang dinyatakan baik dengan skor 2261 (84%) karena berada pada nilai rentang 1836 sampai dengan skor 2268 yang berarti berada pada kriteria Baik.
- 2) Faktor penghambat dalam Strategi Pelestarian Cagar Budaya dalam upaya mendorong pengambilan Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon misalnya; . Penetapan status situs Cagar Budaya yang belum jelas, penetapan zonasi yang kurang melindungi keseluruhan aset Cagar Budaya. ,konflik Pemanfaatan dan Pengelolaan, sarana dan Prasarana yang belum memadai dan fasilitas yang belum memadai.
- 3) Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan Strategi Pelestarian Cagar Budaya dalam upaya mendorong pengambilan Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon misalnya ; penetapan situs Cagar Budaya secara efektif dan efisien; penetapan zonasi seharusnya dimulai dari situs, sehingga di dalam setiap kawasan akan terdapat lebih dari satu sistem zonasi karena setiap situs memiliki sistem zonasinya sendiri-sendiri. Dalam UU Cagar Budaya konsep zonasi bukan suatu tindakan untuk mengelompokkan Cagar Budaya menurut karakternya, tetapi merupakan sarana untuk tujuan perlindungan Cagar Budaya melalui pengaturan fungsi ruang.,perencanaan pelestarian secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pelestarian Cagar Budaya pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Cirebon yang selanjutnya bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan saran dan prasarana fasilitas yang terkjamin.

Saran

Hasil dari dari penelitian ini ada beberapa saran yang berhubungan dengan Strategi Pelestarian Cagar Budaya terhadap Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon, berikut ini penulis akan mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Penetapan peraturan khusus yang mengatur tentang pelestarian situs Cagar Budaya sebagai nilai kearifan lokal, dari pemerintah daerah agar dipercepat dalam proses pengesahannya di DPRD kota Cirebon.
- 2) Ketentuan peraturan terkait sistem zonasi perlu diperjelas, sehingga upaya pelestarian Cagar Budaya dapat dilaksanakan lebih maksimal.
- 3) Pemberian sosialisasi pentingnya pelestarian Cagar Budaya yang dapat dilakukan dengan cara seminar atau bisa juga penyuluhan langsung dari pemerintah untuk para pengelola situs Cagar Budaya dan kepada masyarakat sekitar.

- 4) Diperlukan adanya penyusunan anggaran yang tepat efektif dan efisien sehingga perumusan anggaran untuk pengelolaan Cagar Budaya dapat terencana. Sarana dan prasarana terhadap Cagar Budaya, untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung yang datang tersebut dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah tidak kondusif atau tidak bagus lagi dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar Cagar Budaya.
- 5) Bagi Pemerintah Daerah atau pihak pengelola situs Cagar Budaya harus lebih tanggap memperhatikan kebutuhan wisatawan yang berkunjung dan melengkapi fasilitas-fasilitas pada objek wisata serta mengelola dengan baik fasilitas yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, R. (2016). *Pengambilan Keputusan landasan filosofi, konsep dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2016). *Teori dan teknik pengambilan keputusan : Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadiyanta, E. (2017). *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik konsep, teori dan isu. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit GavaMedia.
- Kebudayaan, B. P. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*. Jakarta: CV Adi Perkasa.
- Kebudayaan, T. D. (2004). *Kebijakan Pelestarian dan Pelestarian Kebudayaan*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nani, T. (2003). *Dialog Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Yogyakarta: CV Mitra Sari.
- Nugraha, E. (2014). *Statistik untuk Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Panuju. (2008). *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Pasalong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif. Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

Salusu, J. (2015). *Pengambilan keputusan Stratejik untuk organisasi publik dan organisasi non profit*. Jakarta: Grasindo.

Sedarmayanti. (2014). *Manjemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama Rosdakarya.

Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.